



Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dalam Perang Rusia-Ukraina Selama Masa Presidensi G20 di Indonesia

INFO PENULIS

Muhamad Husein
Universitas Paramadina
muhamadhusein.edu@gmail.com

Tatok Djoko Sudiarto
Universitas Paramadina
tatok.sudiarto@paramadina.ac.id

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 4, No. 3, Desember 2024
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2024 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Husein, M., & Sudiarto, T. D. (2024). Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dalam Perang Rusia-Ukraina Selama Masa Presidensi G20 di Indonesia. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1237-1245.

Abstrak

Diplomasi luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif menjadi sorotan selama masa Presidensi G20, terutama dalam konteks konflik Rusia-Ukraina. Prinsip diplomasi ini, yang menekankan kebebasan dalam menentukan sikap nasional dan partisipasi aktif dalam menciptakan perdamaian dunia, diimplementasikan oleh Indonesia dengan tujuan mempertahankan netralitas serta mendorong penyelesaian konflik secara damai. Selama Presidensi G20, Indonesia menghadapi tekanan dari negara-negara Barat untuk bersikap tegas terhadap Rusia, sementara juga harus menjaga hubungan baik dengan negara-negara lain seperti China dan India. Indonesia memilih jalur diplomasi yang seimbang dengan tidak memihak salah satu blok kekuatan dunia dan mengundang baik Rusia maupun Ukraina untuk menghadiri KTT G20. Setelah KTT, Indonesia tetap mempertahankan netralitas diplomatiknya, tetapi juga aktif dalam mendorong upaya perdamaian, termasuk melalui dukungan terhadap resolusi PBB yang menekankan pentingnya penyelesaian konflik secara damai dan sesuai dengan hukum internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun belum berhasil secara efektif menghentikan konflik, diplomasi Indonesia dinilai sukses dalam menjaga prinsip bebas aktif dan berperan sebagai mediator dalam upaya perdamaian global. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika diplomasi internasional Indonesia dan relevansinya dalam situasi geopolitik yang kompleks, serta menggarisbawahi efektivitas pendekatan diplomasi bebas dan aktif dalam menghadapi tantangan global.

Kata Kunci: Diplomasi bebas aktif, G20, Konflik Rusia-Ukraina

Abstract

Indonesia's free and active foreign diplomacy was in the spotlight during the G20 Presidency, especially in the context of the Russia-Ukraine conflict. This principle of diplomacy, which emphasizes freedom in determining national attitudes and active participation in creating world peace, was implemented by Indonesia to maintain neutrality and encourage peaceful conflict resolution. During the G20 Presidency, Indonesia faced pressure from Western countries to take a firm stance against Russia, while also having to maintain good relations with other countries such as China and India. Indonesia chose a balanced diplomatic path by not siding with any of the world's power blocs and inviting both Russia and Ukraine to attend the G20 Summit. After the summit, Indonesia maintained its diplomatic neutrality but was also active in encouraging peace efforts, including through support for UN resolutions that emphasized the importance of resolving conflicts peacefully and by international law. The results of the study show that although it has not succeeded in effectively stopping the conflict, Indonesian diplomacy is considered successful in maintaining the principle of being free and active and acting as a mediator in global peace efforts. This study provides in-depth insight into the dynamics of Indonesian international diplomacy and its relevance in complex geopolitical situations and underlines the effectiveness of the free and active diplomacy approach in facing global challenges.

Keywords: Free and active diplomacy, G20, Russia-Ukraine Conflict.

A. Pendahuluan

Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara mendalam aspek-aspek yang melandasi pentingnya studi mengenai Diplomasi Luar Negeri Indonesia yang Bebas dan Aktif dalam Perang Rusia-Ukraina Selama Masa Presidensi G20 di Indonesia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022, dunia menyaksikan salah satu konflik internasional terbesar setelah Perang Dunia II. Konflik ini tidak hanya melibatkan kepentingan dua negara, tetapi juga menimbulkan dampak global dalam bidang ekonomi, politik, dan kemanusiaan. Sebagai negara yang mengusung prinsip diplomasi bebas aktif, Indonesia memiliki posisi yang unik dalam kancah internasional, terutama ketika berperan sebagai Presiden G20 pada tahun 2022. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana Indonesia menjalankan prinsip bebas aktif dalam mengelola diplomasi internasional selama konflik Rusia-Ukraina di tengah tekanan dari berbagai pihak, khususnya negara-negara Barat, untuk mengambil sikap lebih tegas.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan luar negeri dan teori diplomasi sebagai kerangka teoretis utama. Teori kebijakan luar negeri berfungsi untuk menganalisis bagaimana negara-negara, khususnya Indonesia, merumuskan kebijakan luar negerinya dalam menghadapi konflik internasional (Komala dkk., 2023). Indonesia mengacu pada prinsip bebas aktif yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta sejak awal kemerdekaan, di mana Indonesia berupaya untuk tidak terjebak dalam blok politik manapun dan berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dunia (Fahri & Fitriyah, 2023). Teori diplomasi digunakan untuk memahami strategi-strategi diplomatik yang diterapkan Indonesia dalam menghadapi perang Rusia-Ukraina, terutama dalam konteks pertemuan G20 yang menjadi ajang interaksi antara negara-negara besar dunia (Midhol, 2022). Melalui kerangka teori ini, penelitian menganalisis langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia dalam mengelola konflik ini dan peran aktifnya sebagai mediator di forum internasional.

Invasi Rusia terhadap Ukraina yang bermula pada tahun 2014 di wilayah Krimea yang merupakan wilayah Ukraina dengan populasi etnis Rusia terbanyak karena statusnya yang sebelum tahun 1954 juga merupakan wilayah teritorial milik Rusia. Fakta ini tentunya membuat Rusia lebih mudah dalam melakukan invasi terhadap Ukraina karena keberadaan masyarakat yang pro Ukraina tidak begitu banyak. Pendorong lainnya yang membuat Krimea menjadi sasaran bagi invasi Rusia adalah wilayahnya yang berada di posisi strategis Laut Hitam dan terdapat pula markas besar militer milik Rusia di wilayah tersebut. Dengan diambil alihnya Krimea membuka jalan bagi Rusia untuk semakin memberikan pengaruhnya terhadap Ukraina.

Pada tahun 2021, Rusia secara terbuka mengirim pasukan militer yang cukup besar di sepanjang wilayah perbatasan Rusia-Ukraina. Rusia juga mengirim pasukan militer ke Belarus untuk memberikan dukungan bagi gerakan separatistis di sana dan mengirimkan sejumlah

pasukan lagi ke wilayah Moldova dan Krimea. Hingga pada Februari 2022, terdapat setidaknya 190,000 anggota pasukan militer berposisi di sekitar perbatasan Ukraina (Wintour, 2022). Ketegangan antara Ukraina dan Rusia menjadi semakin meningkat ketika pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia memulai invasinya ke wilayah Ukraina sesuai dengan perintah dari presidennya, Vladimir Putin. Pemimpin Rusia tersebut mengklaim bahwa gerakan pasukan militer yang memasuki Ukraina berperan sebagai aktor perdamaian, namun klaim tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi di hari tersebut. Suara ledakan terdengar di kota-kota besar di Ukraina dan sirene serengana udara terdengar di ibu kota Ukraina, Kyiv. Melalui serangan ini, diketahui bahwa pihak Rusia berusaha untuk mengambil alih Kyiv dan membuatnya menjadi pusat pemerintahan yang berkiblat pada Moskow. Upaya Rusia bisa dikatakan tidak mudah karena adanya pertahanan yang kuat dari Ukraina. Namun dengan adanya serangan Rusia membuat urgensi keamanan di Ukraina menjadi semakin meningkat, terutama dengan berjatuhnya banyak korban, termasuk warga sipil yang berada di Ukraina.

PBB telah memperkirakan bahwa konflik di Donbas telah merenggut sebanyak 14.000 korban jiwa pada tahun 2014 hingga tahun 2021. Seperempat dari mereka yang tewas merupakan warga sipil dan hampir 40.000 orang mengalami luka-luka dalam konflik tersebut. Sejak awal operasi militer Rusia hingga akhir tahun 2022, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mencatat bahwa sebanyak 6.884 warga sipil terbunuh dan 10.947 mengalami luka. Hal ini membuktikan bahwa korban dari operasi militer ini kebanyakan dialami oleh warga sipil. Departemen AS juga memperkirakan sekitar 40.000 warga sipil tewas dalam operasi militer Rusia tersebut.

Indonesia sebagai tuan rumah KTT G20 di Bali di tengah krisis Rusia-Ukraina, dan akan menjadi ukuran penting bagi integritas dan konsistensi diplomasi luar negeri Indonesia. Posisi Rusia dalam kelompok G20 memecah belah anggota yang mencap Rusia sebagai musuh dalam perang dengan Ukraina. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi dalam waktu dekat; setelah aneksasi Ukraina pada tahun 2014, negara-negara raksasa Barat mengeluarkan Rusia dari konferensi kelompok G8. Skenario ini akan berbeda dalam kelompok G20 yang lebih besar, yang mencakup negara-negara berkembang seperti Cina, India, dan Arab Saudi, yang umumnya bersikap netral terhadap blok negara adidaya barat. Dengan demikian, presidensi Indonesia di G20 merupakan kesempatan besar bagi untuk menunjukkan kapabilitas dan potensi sebagai negara yang memiliki pengaruh bagi masyarakat dunia.

Pemerintah Indonesia menggarisbawahi bahwa agenda KTT G20 di Bali berpusat pada isu-isu ekonomi, khususnya kerja sama ekonomi selama masa pemulihan Covid19, dengan tema "Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat." Kementerian Luar Negeri Indonesia lebih lanjut menyatakan bahwa sebagai tuan rumah, Indonesia akan bersikap netral dan tidak akan membuat penilaian berdasarkan aliran yang diprakarsai oleh negara lain. Namun, hal ini mendapat tantangan dari negara-negara adidaya Barat, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, serta ancaman boikot jika tidak dihadiri oleh para kepala negara dari negara-negara tersebut.

Indonesia, yang sebelumnya pernah berperan sebagai mediator ASEAN dalam konflik antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1991, kini memiliki kesempatan untuk meningkatkan posisi dan citranya untuk "meninju lebih keras" dalam Presidensi G20. Penelitian ini menjelaskan bagaimana diplomasi luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif diimplementasikan terkait perang Rusia-Ukraina selama masa Presidensi Indonesia di G20. Perhelatan G20 di Bali akan menjadi kontestasi diplomasi luar negeri Indonesia yang bebas aktif dapat terlihat dari pemilihan partisipan dan agenda pada KTT tersebut. Selain itu, arah diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 dan kewajiban presidensialnya dapat menjadi tolok ukur bagi para penggantinya dan menjadi tantangan yang besar bagi kelompok G20 dalam waktu yang dekat.

Banyak penelitian sebelumnya yang membahas mengenai prinsip diplomasi bebas aktif Indonesia dan bagaimana prinsip ini diterapkan dalam berbagai konteks global. Misalnya, studi mengenai diplomasi Indonesia selama era Perang Dingin menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif memungkinkan negara ini untuk tetap netral tanpa kehilangan hubungan baik dengan kedua blok utama, yaitu blok Barat dan blok Timur (Samad & Permatasari, 2021).

Dalam konteks konflik Rusia-Ukraina, beberapa penelitian sebelumnya membahas bagaimana negara-negara non-blok, termasuk Indonesia, menghadapi tekanan dari negara-negara besar untuk berpihak (Hutabarat, 2022). Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung berfokus pada respons Indonesia secara umum tanpa melihat peran Indonesia sebagai Presiden G20. Sementara itu, studi mengenai diplomasi Indonesia dalam forum internasional, seperti G20 dan PBB, menunjukkan bahwa Indonesia sering memainkan peran

penting dalam menciptakan ruang untuk dialog dan kerja sama internasional. Misalnya, penelitian mengenai peran Indonesia dalam konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang kuat dalam menjadi mediator dalam konflik internasional (Astageni, 2024).

Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena fokus utama terletak pada masa spesifik Presidensi G20 Indonesia dan bagaimana Indonesia menerapkan prinsip bebas aktif dalam konteks perang Rusia-Ukraina. Sebagian besar penelitian sebelumnya hanya membahas diplomasi Indonesia secara umum atau dalam konflik internasional yang berbeda. Penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana Indonesia, di tengah tekanan internasional yang kuat dari negara-negara Barat dan sekutunya, berusaha mempertahankan netralitasnya sambil tetap berperan aktif dalam mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomatik.

Selain itu, penelitian ini mengangkat bagaimana Indonesia memanfaatkan forum G20 sebagai platform untuk meredakan ketegangan global terkait perang Rusia-Ukraina. G20 adalah forum ekonomi internasional yang terdiri dari negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia, dan Indonesia, sebagai tuan rumah, memiliki kesempatan besar untuk memainkan peran sebagai pemimpin dalam diplomasi global. Namun, penelitian sebelumnya belum secara spesifik menyoroti bagaimana forum ekonomi ini dapat digunakan untuk menangani isu-isu politik dan konflik internasional seperti perang Rusia-Ukraina.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada eksplorasi lebih dalam mengenai peran Indonesia dalam memanfaatkan Presidensi G20 sebagai instrumen diplomasi yang mendukung prinsip bebas aktif di tengah konflik global. Penelitian ini menambahkan wawasan baru tentang bagaimana Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara tekanan dari negara-negara besar dengan upayanya untuk mendorong dialog dan penyelesaian damai. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana strategi diplomatik Indonesia beradaptasi dengan dinamika geopolitik yang berubah cepat selama masa perang, terutama di saat forum-forum multilateral seperti G20 menjadi arena yang sangat krusial.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai peran negara berkembang dalam konflik internasional yang melibatkan negara-negara adidaya. Dengan berfokus pada peran Indonesia sebagai negara yang memimpin G20, penelitian ini menunjukkan bagaimana negara-negara berkembang dapat mengambil inisiatif dalam penyelesaian konflik global tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip kebijakan luar negerinya. Urgensi dari penelitian ini sangat tinggi mengingat eskalasi konflik Rusia-Ukraina dan dampaknya terhadap stabilitas global. Perang ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan krisis kemanusiaan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi global melalui lonjakan harga energi dan pangan, yang berdampak langsung pada negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dengan peran Indonesia sebagai Presiden G20, penting untuk memahami bagaimana negara ini dapat menggunakan diplomasi luar negerinya yang bebas aktif untuk mendorong perdamaian global dan memitigasi dampak negatif dari konflik tersebut.

Lebih jauh, penelitian ini juga penting untuk memperkuat pemahaman tentang diplomasi Indonesia di forum internasional. Dengan semakin kompleksnya dinamika geopolitik dunia, peran Indonesia dalam menciptakan dialog dan penyelesaian damai di berbagai konflik menjadi semakin krusial. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting bagi kajian hubungan internasional dan kebijakan luar negeri, terutama terkait peran negara berkembang dalam menciptakan stabilitas global.

B. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mengenai diplomasi luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif selama perang Rusia-Ukraina dalam masa Presidensi G20 di Indonesia menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Penelitian ini berfokus pada analisis dokumen, wawancara, dan studi pustaka untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang strategi diplomasi Indonesia dalam konteks konflik internasional tersebut (Jaya, 2020). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber primer dan sekunder, termasuk pernyataan resmi pemerintah Indonesia, laporan Kementerian Luar Negeri, serta dokumen yang relevan dari pertemuan G20 dan Majelis Umum PBB.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan yang berbeda dari masalah penelitian yang sedang dihadapi (Purwanza, 2022). Data sekunder ini meliputi berbagai literatur, artikel, jurnal, dan sumber-sumber berita atau situs web yang relevan dengan topik

penelitian mengenai diplomasi luar negeri Indonesia selama Presidensi G20 dalam konteks perang Rusia-Ukraina.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang dikumpulkan dan karakteristik dari penelitian kualitatif yang digunakan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan *descriptive content analysis*, analisis data dilakukan secara bertahap, mengikuti proses pengumpulan data yang tidak simultan tetapi berdasarkan fakta objektif yang diperoleh. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan analisis konten. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan mengelompokkan data berdasarkan kategori atau tema yang relevan dengan permasalahan penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

G-20 bagaimanapun harus dilihat sebagai suatu kelompok internasional baru, namun dengan tanggung jawab yang lebih inklusif. Sebagai suatu kelompok, forum ini hanya melibatkan sejumlah negara anggota (19 negara bangsa) dan satu organisasi regional (Uni Eropa); sejumlah anggota ini pula yang berkewajiban hadir dalam pertemuan-pertemuan G-20 baik di tingkat pejabat senior, kelompok kerja, di tingkat kementerian keuangan dan gubernur bank, di tingkat Sherpa maupun di tingkat KTT. Sejumlah anggota tersebut pula yang 'memiliki' hak untuk menyepakati sejumlah komitmen-komitmen dan tentu saja mereka pula yang bertanggungjawab untuk melaksanakan komitmen-komitmen tersebut. Sebagai sebuah kelompok internasional, G-20 harus memberikan manfaat kepada anggota-anggotanya karena manfaat itu pula yang akan mendorong keterlibatan anggota-anggotanya untuk tetap aktif. Kesuksesan sebuah kelompok internasional sebagai kelompok yang bermanfaat juga sangat tergantung pada kemampuan negara-negara anggotanya untuk memenuhi komitmen yang telah dibuat di dalam kelompok tersebut. Untuk mencapai sasaran tersebut, G-20 melakukan dua pendekatan sekaligus:

Kelompok ini merangkul negara-negara yang memiliki modalitas ekonomi yang secara bersama-sama menguasai sebagian besar perekonomian dunia. Kelompok ini juga melibatkan perwakilan-perwakilan dari Bank Dunia, IMF dan lembaga-lembaga keuangan global lainnya. Pendekatan pertama memberikan keuntungan bahwa apa yang dilakukan G-20 akan berdampak sistemik yang signifikan terhadap perekonomian regional maupun global.

Indonesia telah menjadi anggota G-20 sejak forum intergovernmental ini dibentuk di tahun 1999. Bagi Indonesia kelompok eksklusif ini merupakan arena bergengsi tinggi di mana Indonesia dapat mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya (Bakrie dkk., 2022). Namun Indonesia juga memahami posisi unik dan tanggungjawab vitalnya untuk mewakili negara-negara berkembang. Pertama, Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang karena pertumbuhan ekonominya tercatat cukup penting di antara negara-negara berkembang lainnya dimasukkan dalam kategori *emerging economy*; sebagai *emerging economy* Indonesia mendapat hak istimewa untuk duduk dalam kelompok tersebut. Kedua, Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah China, Amerika Serikat dan India. Ketiga, mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan karenanya dapat memainkan peran potensial untuk menjembatani perbedaan-perbedaan di antara peradaban dunia. Keanggotaan Indonesia dalam kelompok dapat membantu memperbaiki citra tentang perbedaan antara Barat dan Islam. Keempat, Indonesia merupakan negara demokrasi baru yang dalam proses konsolidasi. Keanggotaan Indonesia dapat memberikan inspirasi ke negara-negara lain untuk mempromosikan demokrasi dan mempertahankan perumbuhan ekonomi tinggi. Kelima, secara geografis Indonesia memiliki posisi yang signifikan. Indonesia merupakan satu-satunya anggota ASEAN yang menjadi anggota tetap G-20. Tentu saja bisa ditambahkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang di masa lalu pernah terpuruk oleh krisis ekonomi yang dahsyat dan kini telah berhasil mengatasinya dengan relatif baik (Kurniawan dkk., 2023).

Keunikan diatas diyakini menjadi alasan kuat dipilihnya Indonesia dalam G-20. Selain potensinya sebagai global buyer yang besar di dunia karena jumlah penduduknya yang besar, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil akan berdampak sistemik ke stabilitas pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dan lebih lanjut memberikan kontribusi stabilitas perekonomian di Asia dan dunia. Keberhasilan Indonesia akan menjadi model yang menarik pula bagi penguatan sistem demokrasi liberal di dunia. Ini akan menginspirasi suatu proses demokratisasi yang ideal yang ditopang oleh penguatan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kehadiran Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Muslim memberikan citra positif bagi G-20 terutama untuk menangkis persepsi negatif dari *clash of civilization* (benturan peradaban) antara peradaban Barat dan Islam. G-20 adalah

antitesis perbenturan peradaban yang menunjukkan bahwa Barat siap bekerjasama dengan negara-negara Muslim.

Indonesia telah menjadi tuan rumah dalam presidensi G20 untuk pertama kalinya yang diselenggarakan pada November 2022 silam. Presidensi Indonesia terjadi pada masa-masa yang penuh tantangan, di saat dunia perlahan-lahan mulai pulih dari pandemi global Covid-19 dan di ambang Perang Rusia-Ukraina yang masih berlangsung. Indonesia kini memiliki tanggung jawab sebagai presiden G20 untuk menjadi pengarah kelompok yang terdiri dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia dan Uni Eropa untuk menjembatani kepentingan bersama di antara para anggotanya dalam mengatasi isu-isu global yang tengah berlangsung.

Di dalam G20 sendiri, ada beberapa negara yang mengambil sikap tegas dalam mengutuk tindakan yang diambil oleh Rusia dalam konflik yang sedang berlangsung dengan Ukraina. Hal ini menyebabkan ketidakpastian seputar KTT tersebut karena ada beberapa negara yang tidak menyukai kehadiran Rusia. Namun, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah menegaskan bahwa sikap Indonesia terhadap konflik yang sedang berlangsung tidak akan diintervensi oleh negara lain dan tetap tidak memihak. Kementerian Luar Negeri secara konsisten menyatakan akan mengundang seluruh negara anggota G20 tanpa terkecuali. Presiden Jokowi memastikan bahwa negaranya akan tetap tidak memihak dalam konflik tersebut dan kebaikan yang lebih besar dalam diplomasi global masih menjadi pembahasan utama dalam KTT G20 dan bukan geodiplomasi (Channel News Asia, 2022). Dengan tagline "Pulih Bersama, Pulih Lebih Kuat", pemerintah Indonesia ingin memastikan bahwa momentum KTT G20 tidak terbawa oleh isu-isu geodiplomasi yang sedang berlangsung sehingga banyak isu global lainnya yang sedang berlangsung tidak dibahas dalam KTT pada November 2022.

Meskipun Perang Rusia-Ukraina memang menambah tantangan bagi G20, ada dimensi lain dari masalah yang harus dihadapi bersama. Permasalahan tersebut adalah tanggung jawab pemerintah Indonesia melalui sherpa KTT untuk memastikan diskusi yang bermanfaat pada November 2022. Tantangan ini dapat mengukuhkan pengaruh Indonesia tidak hanya sebagai kekuatan regional tetapi juga global. Arah agenda pada bulan November sangat bergantung pada tangan Indonesia untuk memimpin KTT yang dapat menghasilkan hasil yang bermanfaat bagi kebaikan dunia. Isu-isu yang berkisar dari keterlibatan perdagangan antar anggota, terutama di era pemulihan pasca-Covid19 dan energi terbarukan, akan menjadi bahan diskusi (The Diplomat, The Challenges Facing Indonesia's G20 Presidency, 2022) (Athira, 2024).

Terlepas dari situasi yang menantang dan masalah yang kompleks, Presiden Jokowi, sebagai Presiden G20 dan anggota Global Crisis Response Group Sekretaris Jenderal PBB, telah memutuskan untuk memberikan kontribusi daripada berdiam diri. Meskipun Ukraina bukan anggota G20, namun ketua kelompok tersebut memiliki kewenangan untuk mengundang negara tamu. Dalam upaya meredakan ketegangan, Indonesia telah mengundang Ukraina untuk menghadiri pertemuan meskipun bukan anggota G20. Beberapa negara telah memperingatkan untuk memboikot jika Putin hadir. Jokowi telah mengundang Putin, yang merupakan anggota G20, dan Zelensky sebagai peninjau ke KTT G20, yang dijadwalkan akan diadakan di Bali pada bulan November 2022, meskipun ada tekanan dari beberapa negara Barat untuk tidak mengundang Putin. Di sisi lain, negara non-Barat seperti Cina berusaha melobi Indonesia untuk mengeluarkan konflik dari agenda KTT G20 di Bali karena KTT tersebut harus fokus pada masalah ekonomi (Shi Jiangtao, 2022). Namun demikian, tidak bijaksana juga bagi Indonesia untuk mengikuti langkah Cina dan menghapus konflik dari agenda G20 demi agenda ekonomi.

Perang Rusia-Ukraina, menurut beberapa ahli ekonomi di Indonesia, mungkin akan menjadi topik yang tidak dapat dihindari (Karman, 2022). Hal ini terjadi karena perang telah memperburuk krisis ekonomi global, terutama dengan menyebabkan perubahan harga komoditas dan minyak. Selain itu, lebih dari separuh anggota G20 telah bersekutu dengan salah satu pihak yang bertikai. Sebaliknya, pertemuan G20 dapat menjadi katalisator bagi Indonesia untuk menunjukkan dukungan konkretnya pada proses perdamaian dengan bertindak sebagai mediator antara Rusia dan Ukraina.

Indonesia memiliki suara penting di panggung global sebagai salah satu negara berkembang terbesar di dunia dan sekutu bersahabat bagi Rusia dan Ukraina (Sudjatmiko dkk., 2022). Setelah pertemuan G7 di Jerman, Presiden Jokowi akan bertolak ke Kyiv untuk bertemu dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, dan ke Moskow untuk melakukan pembicaraan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Dengan kunjungannya ke Ukraina dan Rusia, Presiden Indonesia di G20, Jokowi, menunjukkan bahwa negaranya memimpin dalam mempromosikan perdamaian, mengakhiri bencana kemanusiaan di Ukraina, dan mengeliminasi potensi krisis pangan global. Kunjungan ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam apa yang dapat disepakati oleh kedua negara yang bertikai untuk mencapai gencatan senjata. Inisiatif Indonesia

untuk berkontribusi dalam mendorong perdamaian dunia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, tercermin dalam kunjungan tersebut. Oleh karena itu, Presiden melakukan kunjungan tersebut dengan tetap mempertahankan diplomasi luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Jelas bahwa konflik Rusia-Ukraina berimplikasi pada berbagai aspek kehidupan, terutama terkait distribusi pasokan energi dan pangan di dunia. Kondisi ini mengakibatkan adanya perbedaan pendapat terkait kehadiran Presiden Rusia pada pelaksanaan KTT G20 di Indonesia. Dengan adanya perbedaan pendapat tersebut menimbulkan polarisasi yang cukup kompleks di anggota G20, AS dan sekutunya sangat jelas menentang kehadiran Presiden Rusia, namun baik China maupun Brazil berpendapat bahwa Rusia tetap perlu dilibatkan dalam Presidensi G20. Mengutip pernyataan pengamat hubungan internasional dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Dr. Riza Noer Arfani, penolakan keterlibatan Rusia dalam pertemuan G20 merupakan sebuah drama diplomasi. Tujuannya adalah untuk mempengaruhi opini publik internasional terkait Rusia yang dianggap sebagai agresor di Ukraina (Karamoy, 2023).

Dalam menyikapi polarisasi tersebut, pemerintah Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa seluruh negara anggota G20 wajib hadir tanpa terkecuali. Karena untuk menciptakan solusi atau jawaban dari berbagai permasalahan global yang kompleks dalam hal Global Health Architecture, transisi energi yang berkelanjutan dan transformasi ekonomi digital. Untuk membahas masalah-masalah multidimensi tersebut, seluruh anggota G-20 diwajibkan hadir dan membahasnya secara bersama-sama. Sebab, tidak dapat dipungkiri bahwa Rusia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam peningkatan atau pertumbuhan ekonomi dunia. Sanksi Barat yang semakin berat terhadap Rusia menyebabkan kenaikan harga komoditas dan inflasi global yang terus meningkat.

Berbagai pihak mendorong Indonesia untuk dapat menggunakan Presidensi G20 sebagai sarana penyelesaian konflik bersenjata Rusia-Ukraina. Dalam sistem diplomasi luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia, memberikan ruang strategis dalam mengambil kepercayaan negara-negara untuk dapat mengambil langkah konkrit dalam menyelesaikan konflik Rusia-Ukraina (Hendra dkk., 2021). Jika memang Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjadi penengah antara Rusia dan Ukraina, Indonesia tentu akan mendapatkan respon positif dan mencetak sejarah dalam kepemimpinan global (Kurniadi, 2024).

Sesuai dengan konstitusi negara bahwa Indonesia menentang segala bentuk kekerasan perang, maka Indonesia tentu berharap adanya solusi yang baik dengan mengedepankan win-win solution terhadap konflik Rusia-Ukraina. Namun, melihat alasan dan tujuan dari G20, menjadi sebuah perdebatan apakah forum ini memang dapat digunakan untuk menyelesaikan konflik tersebut atau tidak. Pada dasarnya forum G20 Presidency tidak dirancang untuk dapat menghentikan operasi militer semua negara tanpa terkecuali (Roring & Utomo, 2024). Mengutip dari pernyataan Edy Prasetyono bahwa, "Indonesia tidak ikut menjatuhkan sanksi, bukan berarti pro-Rusia, tetapi karena Indonesia memegang prinsip integritas dan menghormati hukum internasional karena pada saat itu belum ada ketetapan sanksi resmi dari PBB". Tentu saja ketiga sektor fokus diskusi ini merupakan isu yang kompleks, beban negara mengakibatkan banyak negara melakukan pembenahan secara internal dalam menghadapi masalah yang bersifat multidimensi ini. Fokus forum ini memang pada sektor keuangan, namun forum G20 ini berlandaskan pada konsensus, sehingga semua harus terlibat dan duduk bersama dengan sarana komunikasi antar pemimpin negara. memenuhi kebutuhan energi dan pangan global (Saryono dkk., 2022).

Pasca pelaksanaan G20, netralitas arah diplomasi luar negeri Indonesia terhadap Konflik Rusia-Ukraina masih terjaga. Hal ini sesuai dengan prinsip diplomasi luar negerinya yaitu bebas aktif, dimana Indonesia tidak berpihak kepada blok manapun. Diplomasi luar negeri mengacu pada keputusan, prinsip, dan tindakan strategis yang dilakukan suatu negara untuk berinteraksi dengan negara lain, organisasi internasional, dan entitas lain yang diatur oleh hukum internasional dengan tujuan mencapai tujuan nasionalnya. Konsekuensinya, setiap negara merumuskan diplomasi atau tindakan luar negerinya sendiri berdasarkan tujuan nasionalnya masing-masing. Salah satu tujuan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan ikut aktif dalam menegakkan tatanan global yang tertib dan damai sesuai yang digariskan dalam UUD 1945. Kehadiran diplomasi internasional Indonesia yang bebas dan aktif ditunjukkan oleh inisiatif perdamaian dalam menanggapi krisis Rusia-Ukraina yang sangat berdampak global.

Diplomasi luar negeri Indonesia mengenai konflik Rusia-Ukraina yang netral bukan berarti hanya netral atau tidak memihak salah satu saja namun Indonesia juga aktif berupaya untuk

mencapai penyelesaian konflik dengan menjadi jembatan perdamaian bagi Rusia dan Ukraina. Selain itu, Indonesia juga berupaya aktif mencapai keamanan global melalui pendekatan soft power dengan misi perdamaian, merekomendasikan solusi agar dapat mencapai perdamaian, dan memberikan bantuan kemanusiaan. Indonesia secara tegas meminta konflik segera berakhir dengan mengedepankan diplomasi.

Dalam upaya menghentikan konflik Rusia-Ukraina Indonesia juga mendorong dewan keamanan PBB agar mengeluarkan diplomasi dalam penghentian konflik. Indonesia dalam pertemuan lanjutan ke-11 Majelis umum PBB yang dilaksanakan di New York 23 Februari 2023, pertemuan tersebut memuat rancangan yang berjudul "*UN Charter principles underlying a comprehensive, just and lasting peace in Ukraine*". Indonesia mendukung resolusi yang dirancang pada sidang darurat khusus MU PBB ke 11 tersebut karena telah menjunjung tinggi prinsip sesuai dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Dengan demikian, upaya Indonesia mendorong kedua negara yang berkonflik untuk mengakhiri perang melewati meja perundingan kembali.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa arah diplomasi luar negeri Indonesia terhadap Konflik Rusia Ukraina ini netral namun tetap menekankan prinsip bebas aktif dilihat Indonesia turut aktif dalam mendorong perdamaian dan kemanusiaan global. Meskipun belum efektif dalam menyelesaikan konflik, Indonesia dinilai berhasil dalam upaya diplomasi terhadap kedua negara yang sedang berkonflik tersebut.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa konflik antara Rusia dan Ukraina telah berlangsung lama tanpa tanda-tanda akan segera berakhir. Sejak Rusia menginvasi Ukraina, perang ini telah memberikan dampak global. Walaupun ada sanksi ekonomi terhadap Rusia dan pengusiran diplomat Rusia dan negara-negara barat mendukung Ukraina dengan menyediakan senjata. Amerika Serikat dan sekutunya, termasuk Australia dan negara-negara Uni Eropa, telah menyarankan agar Rusia tidak diundang ke KTT G20 karena invasinya. Hal ini membuat Indonesia, sebagai tuan rumah KTT G20 berada dalam sorotan. Presiden Jokowi dalam kapasitasnya sebagai Presiden G20 dan anggota Global Crisis Response Group PBB memutuskan untuk mengambil langkah proaktif. Dengan menggunakan hak prerogatifnya untuk mengundang negara tamu, yakni Ukraina. Sedangkan disisi lain beberapa negara mengancam akan memboikot jika Putin hadir. Jokowi tetap mengundang Putin, anggota G20, serta Zelensky sebagai peninjau di KTT G20 yang dijadwalkan berlangsung di Bali pada November 2022, meskipun ada tekanan dari Barat untuk tidak mengundang Putin.

Setelah pelaksanaan KTT G20, Indonesia tetap menjaga netralitas diplomasi luar negerinya terhadap konflik Rusia-Ukraina sesuai prinsip bebas aktif, yang berarti tidak berpihak pada blok manapun. Netralitas ini bukan hanya berarti tidak memihak, tetapi juga aktif mendorong penyelesaian konflik dengan berperan sebagai mediator perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Indonesia juga mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengambil langkah diplomatik guna menghentikan konflik tersebut. Pada pertemuan Majelis Umum PBB ke-11 di New York pada 23 Februari 2023, Indonesia mendukung resolusi yang menekankan pentingnya perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Ukraina, sejalan dengan Piagam PBB dan hukum internasional. Dengan demikian, Indonesia terus berupaya mendorong dialog dan perundingan damai antara Rusia dan Ukraina. Meskipun belum sepenuhnya berhasil menyelesaikan konflik, diplomasi Indonesia dianggap cukup efektif dalam upaya mendorong perdamaian dan kemanusiaan global.

E. Referensi

- Astageni, E. S. (2024). Arti Baik Menurut George Edward Moore: Usaha Pemerintah Indonesia Mendukung Perdamaian Rusia-Ukraina: The Meaning of Good by George Edward Moore: The Indonesian Government's Business to Support Russia-Ukraine Peace. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 7(2), 192–197. <https://doi.org/10.23887/jfi.v7i2.61052>
- Athira, A. T. (2024). *Peran Diplomasi Parlemen Indonesia Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Rusia Ukraina Periode 2022—2023* [bachelorThesis, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/78588>
- Bakrie, C. R., Delanova, M. O., & Yani, Y. M. (2022). PENGARUH PERANG RUSIA DAN UKRAINA TERHADAP PEREKONOMIAN NEGARA KAWASAN ASIA TENGGARA. *Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.36859/jcp.v6i1.1019>

- Fahri, M. B., & Fitriyah, P. (2023). DIPLOMASI INDONESIA PADA ISU POLITIK RUSIA-UKRAINA DENGAN PENDEKATAN DISCOURSE NETWORK ANALYSIS. *BroadComm*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.53856/bcomm.v5i2.336>
- Hendra, Z., Musani, I., & Samiaji, R. (2021). STUDI KASUS PERANG MODERN ANTARA RUSIA DENGAN UKRAINA TAHUN 2014 DI TINJAU DARI ASPEK STRATEGI DAN HUBUNGAN INTERNASIONAL SERTA MANFAATNYA BAGI TNI AL. *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 2(2), 730–746. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i2.632>
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Anak Hebat Indonesia.
- Karamoy, S. R. (2023). *Posisi Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Rusia – Ukraina Tahun 2022* [S1, Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/14452/>
- Komala, M., Setiawan, A., Zaman, A. N., & Tohari, A. (2023). Diplomasi Indonesia Menghadapi Konflik Rusia dan Ukraina Tahun 2022. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.24853/independen.4.2.97-112>
- Kurniadi, A. (2024). Tantangan Indonesia Hadapi Politik Global Setelah Pemilu 2024. *Jurnal Terekam Jejak*, 2(1), Article 1.
- Kurniawan, F. D., Prawira, R., Eleizar, A. F., & Ridwan, V. M. (2023). Pengaruh Prinsip Bebas-Aktif Dalam Politik Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus BRICS. *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.62017/merdeka.v1i2.687>
- Midhol, A. B. (2022). *KONFLIK RUSIA-UKRAINA DAN PERAN PEMERINTAH INDONESIA*. OSF. <https://doi.org/10.31219/osf.io/sdkpz>
- Purwanza, S. W. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN KOMBINASI*. Cv. Media Sains Indonesia.
- Roring, franky P., & Utomo, H. K. (2024). PROXIMIC DALAM NEGOSIASI INTERNASIONAL: DIPLOMASI JOKOWI – PUTIN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK RUSIA-UKRAINA. *Communitarian: Jurnal Prodi Ilmu Politik*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.56985/jc.v5i2.491>
- Samad, M. Y., & Permatasari, D. (2021). *Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Invasi Rusia Ke Ukraina*. 6.
- Saryono, S., Fajarianti, A., Kurniawati, L. D., Akbariah, A. A., Jabar, I. A., & Yulyanti, F. (2022). Sikap Politik Dan Hukum Internasional Indonesia Terkait Penyerangan Rusia Ke Ukraina. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.37640/jcv.v2i2.1529>
- Sudjatmiko, T., Yayusman, M. S., Budianto, F., & Syafarani, T. R. (2022). PERAN INDONESIA SEBAGAI KEKUATAN MENENGAH DALAM G20 DI TENGAH DISRUPSI GEOPOLITIK KONFLIK RUSIA-UKRAINA. *Jurnal Penelitian Politik*, 19(2), Article 2. <https://doi.org/10.14203/jpp.v19i2.1224>